

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Suku Bunga Pinjaman**

###### **2.1.1.1 Definisi Suku Bunga**

Suku bunga adalah harga penggunaan uang, atau disebut juga sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau diartikan juga sebagai harga meminjam uang untuk memanfaatkan daya beli seseorang dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Bunga dalam penawaran juga dapat dipahami sebagai pendapatan dari pemberian kredit, sehingga pemilik dana juga akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi dengan kesepakatan yang bernilai tinggi. Sebaliknya, dalam istilah permintaan, hal ini dapat dipahami sebagai komisi atas pinjaman atau kompensasi atas penggunaan uang pinjaman oleh nasabah. Dalam transaksi tersebut, kita juga akan mengenakan istilah suku bunga. (Angga Kusuma, 2014)

Suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan suatu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 2014). Sedangkan menurut Sunariyah (2013) suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase pokok per satuan waktu. Bunga merupakan ukuran harga sumber daya yang digunakan debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, menurut Ismail (2010) terdapat dua macam suku bunga berdasarkan sifatnya yaitu:

1. Bunga Simpanan, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk mendorong atau memberikan kompensasi kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga deposito merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabah. Misalnya saja jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.
2. Bunga pinjaman, yaitu jumlah bunga yang harus dibayar kepada peminjam atau harga yang harus dibayar peminjam atau nasabah kepada bank. Misalnya: bunga kredit. (Yulia Ramandhana et al., 2018)

Menurut Novianto (2011), berdasarkan bentuknya suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Suku bunga nominal, adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.
2. Suku bunga riil, adalah suku bunga yang mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. (Angga Kusuma, 2014)

Suku bunga dalam konteks KUR sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap aksesibilitas kredit yang lebih baik. Suku bunga yang kompetitif dalam skema KUR memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas kredit bagi pelaku usaha kecil. Suku bunga yang rendah akan membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil, sehingga memungkinkan mereka untuk memperluas usaha atau mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan

suku bunga yang bersaing, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Ini memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk produk atau layanan mereka, serta untuk melakukan investasi yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas produk tersebut.

#### **2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga Pinjaman**

Menurut Kasmir (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut:

1. **Kebutuhan Dana**

Jika bank kehabisan dana, sementara permintaan pinjaman meningkat, yang akan dilakukan bank untuk memastikan dana tersebut segera terpenuhi adalah dengan menaikkan suku bunga simpanan. Namun kenaikan suku bunga simpanan juga akan menyebabkan kenaikan suku bunga pinjaman.

2. **Sasaran Keuntungan atau Target Laba**

Yang kita inginkan, faktor ini khusus terkait dengan suku bunga pinjaman. Sebaliknya apabila yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka suku bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.

3. **Kualitas Jaminan**

Ini diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

4. **Kebijakan Pemerintah**

Dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi Batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

#### 5. Jangka Waktu

Semakin Panjang jangka waktu pinjaman, maka suku bunga akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko macet dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, tingkat suku bunga akan relatif rendah.

#### 6. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan tingkat suku bunga, terutama suku bunga pinjaman. Niat baik suatu perusahaan dengan kredit yang baik akan menentukan tingkat bunga yang dikenakan nantinya, karena pada umumnya usaha dengan itikad baik relatif memiliki risiko kredit macet rendah di masa depan dan sebaliknya.

#### 7. Produk yang Kompetitif

Untuk produk yang kompetitif, suku bunga kredit yang diberikan relatif rendah dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini dikarenakan produk pesaing memiliki tingkat perputaran produk yang tinggi sehingga pembayaran diharapkan berjalan lancar.

#### 8. Hubungan Baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau Lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki

hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya pun akan berbeda dengan nasabah biasa.

#### 9. Persaingan

Dalam kondisi yang tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana cukup ketat, bank harus bersaing keras dengan bank lain. Sedangkan untuk suku bunga pinjaman harus lebih rendah dari suku bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil.

#### 10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak ketiga adalah pihak yang memberikan bank jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya, jika pihak yang memberikan jaminan adalah orang yang beritikad baik, baik dari segi kemampuan membayar, reputasi maupun loyalitasnya kepada bank, maka tingkat bunganya akan berbeda.

### **2.1.1.3 Fungsi Suku Bunga Pinjaman**

Suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain berdasarkan perhitungan waktu dan nilai ekonomi. Tinggi rendahnya keuntungan hasil ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Fungsi suku bunga dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Mendorong aliran tabungan menjadi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, biasanya menyediakan dana kredit untuk proyek investasi yang menjanjikan keuntungan tertinggi.

3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar suatu negara dengan permintaan uangnya.
4. Merupakan instrumen penting yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. (Angga Kusuma, 2014)

Sedangkan menurut Sunariyah (2013), suku bunga dalam perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong investor untuk menanamkan modalnya.
2. Suku bunga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat kontrol atas dana atau investasi langsung pada sektor perekonomian.
3. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam perekonomian.
4. Pemerintah dapat memanipulasi suku bunga untuk meningkatkan output, sehingga suku bunga dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi.

## **2.1.2 Kredit Bermasalah**

### **2.1.2.1 Definisi kredit bermasalah**

Kredit bermasalah atau dengan kata lain *Non Performing Loan* (NPL) adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan uang yang diterima dari bank dan beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan. Menurut Dahlan Siamat, kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Agar dapat

menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. (Siamat, 2004)

Kredit bermasalah adalah salah satu penyebab utama masalah stagnasi ekonomi. Setiap pinjaman yang terganggu di sektor keuangan meningkatkan kemungkinan untuk membawa perusahaan ke kesulitan dan tidak menguntungkan. Ketika NPL dipertahankan secara permanen, ini akan berdampak pada sumber daya yang tertutup di daerah yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, NPL cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efisiensi ekonomi (Hou, 2007). Dapat disimpulkan bahwa kredit macet atau NPL merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran yang disepakati antara kreditur dan debitur karena sebab-sebab yang disengaja atau tidak dapat dikendalikan. Masalah kredit akan menyebabkan kerugian bank, yaitu tidak diterimanya dana yang dicairkan dan tingkat bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. (Nursyahriana et al., 2017)

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia no. 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001, kredit bermasalah diukur dengan rasio yang membandingkan kredit macet dengan total kredit yang disalurkan. Tingginya nilai NPL akan memperbesar biaya dan berpotensi menimbulkan kerugian bank.

Untuk menjaga kelancarannya, bank harus menjaga kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan menggunakan beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar evaluasi adalah laporan keuangan bank terkait. Berdasarkan laporan keuangan, dapat dihitung sejumlah rasio

keuangan yang sering dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan suatu bank, termasuk NPL. NPL menjelaskan status pembayaran kredit yang berisiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan mengalami kerugian jika perusahaan terlambat mengidentifikasi permasalahan kredit. Bank Indonesia menetapkan tingkat total kredit macet yang wajar sebesar 5% dari total portofolio kreditnya. Jika jumlah piutang tak tertagih melebihi batas kredit, maka akan membahayakan bank karena keuntungan dan likuiditas akan terganggu dan yang paling parah bank akan bangkrut. (Regina Nansi, 2019)

### 2.1.2.2 Kriteria kredit bermasalah

Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kredit Bank Umum menetapkan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 5%. Semakin tinggi nilai kredit bermasalah atau jumlah kredit bermasalah di atas 5%, maka semakin kecil pula keuntungan yang diterima bank.

Kriteria penilaian kredit bermasalah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Kriteria Kredit Bermasalah/NPL**

No	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% < NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPL < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPL \geq 12\%$

Sumber: Website OCBC NISP

### 2.1.2.3 Faktor-faktor terjadinya kredit bermasalah

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada perbankan, yaitu faktor internal bank, faktor internal debitur, dan faktor diluar bank

atau diluar debitur (Soebagio, 2005). Dari sisi internal bank, kelemahan pengelolaan kredit pada bank dan tekanan dari pihak ketiga, agresivitas bank dalam penyaluran kredit, lemahnya sistem pengawasan, campur tangan pemegang saham yang berlebihan, tidak memadainya jaminan dan kredit tanpa jaminan, *over* atau *under financing*, kredit fiktif, dan itikad kurang baik pemilik bank. (Rachmah, 2016)

Dari segi perilaku debitur yang tidak biasa, faktor penyebab kredit bermasalah di bank antara lain manajemen yang buruk, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik usaha, faktor keuangan, penipuan, aktivitas dan ketergantungan debitur terhadap persaingan perbankan yang tidak sehat. (Tangkilisan, 2003)

Faktor diluar bank dan debitur yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) adalah kondisi perekonomian dalam negeri yang mengalami resesi, memburuknya kondisi dunia usaha, terjadinya bencana alam, peraturan pemerintah dan lainnya juga mempunyai dampak yang besar terhadap kinerja keuangan dan operasional. Situasi seperti pengelolaan nasabah, resesi ekonomi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya, kenaikan suku bunga pinjaman, perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil termasuk resesi kelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta risiko kredit termasuk risiko perusahaan, geografis, keamanan, politik, ketidakpastian dan persaingan. (Sutojo, 2000 dan Suhardjono, 2003)

#### 2.1.2.4 Usaha-usaha untuk mengatasi kredit bermasalah

Upaya penyelesaian kredit yang tergolong macet dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut (Samosir, 2009 dan Hakim 2009):

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) adalah perubahan syarat-syarat kredit yang hanya berkaitan dengan jadwal dan/atau jangka waktu pembayaran kredit, termasuk masa tenggang dan besarnya perubahan jangka waktu kredit. Tentu saja tidak semua debitur mendapatkan keuntungan dari kebijakan bank ini, namun hanya mereka yang menunjukkan niat dan karakter jujur serta mempunyai kemampuan untuk membayar atau melunasi utangnya.

b. *Reconditioning* (persyaratan ulang) adalah perubahan seluruh atau sebagian kondisi kredit, tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan kondisi lainnya. Perubahan syarat kredit tidak melibatkan penambahan modal atau suntikan dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan.

c. *Restructuring* (penataan ulang) adalah perubahan kondisi kredit yang berkaitan dengan penambahan dana bank atau konversi seluruh atau sebagian pokok utang menjadi bunga pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi persyaratan bank atau mengambil *partner* uang lain untuk menambah pembayaran.

d. *Liquidation* (likuidasi) adalah penjualan aset yang dijadikan jaminan pelunasan utang. Dalam prakteknya likuidasi ini dilakukan terhadap kredit yang tergolong tidak dapat diperoleh kembali atau terhadap pekerjaan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi dengan penyerahan hasil penjualan kepada nasabah yang bersangkutan.

### 2.1.3 Rasio Kecukupan Modal

#### 2.1.3.1 Definisi rasio kecukupan modal

Rasio kecukupan modal atau dengan kata lain disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan kecukupan modal dan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dan dapat mempengaruhi jumlah modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Rasio kecukupan modal adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar total aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan di bank lain) juga dibiayai dari modal sendiri selain dana yang diperoleh dari sumber lain di luar bank. Tarif rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 8%. Jika CAR bank kurang dari 8% berarti bank tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank. Sementara itu, jika CAR lebih besar dari 8% menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan semakin solvable (Silaban, 2017).

*High Capital Adequacy Ratio* (HCAR) atau rasio kecukupan modal yang tinggi dapat memungkinkan bank meningkatkan cakupan investasi yang menguntungkan. Di sisi lain, bank dengan *Low Capital Adequacy Ratio* (LCAR) atau rasio kecukupan modal rendah kemungkinan besar akan memiliki cakupan investasi menguntungkan yang sempit. Oleh karena itu, secara potensial, HCAR lebih meningkatkan keuntungan daripada LCAR. Oleh karena itu, kemampuan manajemen bank untuk memastikan modal bank efektif menentukan seberapa

memadai modal tersebut. Kecukupan modal digunakan untuk menentukan solvabilitas bank apakah suatu bank memiliki modal yang cukup untuk mendukung risiko dalam laporan posisi keuangannya. Modal bank diatur oleh bank apex yaitu Bank Sentral untuk mengurangi masalah solvabilitas bank. Basel Accord diperbarui secara berkala untuk memenuhi perubahan kondisi sistem keuangan global yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk keselamatan dan praktik yang sehat dari rasio kecukupan modal. (Agbeja et al., 2015)

### **2.1.3.2 Kriteria Rasio Kecukupan Modal**

Rasio kecukupan modal dihitung dengan membagi modal bank dengan aset tertimbang menurut risikonya. Saat ini, rasio minimum modal terhadap aset tertimbang menurut risiko adalah 8%. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, rasio kecukupan modal perbankan minimal sebesar 8%. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 Pasal 2 Tentang Kewajiban Minimum Bank yang kemudian diperbarui dalam Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. (Anindya Utami, 2020)

Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 menegaskan pencapaian rasio kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8%. Ketentuan CAR tersebut prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku standar CAR secara Internasional, yaitu sesuai standar *Bank for International settlement* (BIS). (Riadi, 2020)

Adapun kriteria penilaian rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Kriteria rasio kecukupan modal/CAR**

No	Keterangan	Kriteria
1	Sehat	$> 12\%$
2	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
3	Kurang Sehat	$6\% \leq CAR < 8\%$
4	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber: Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004

### 2.1.3.3 Fungsi Rasio Kecukupan Modal

Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan seberapa besar modal yang dibutuhkan suatu bank dan menjadi dasar penilaian prospek bank untuk melanjutkan operasionalnya. Semakin tinggi rasio kecukupan modal maka bank tersebut semakin tahan terhadap penurunan nilai aset bank akibat adanya aset bermasalah.

Menurut Purba (2011), beberapa fungsi rasio kecukupan modal (CAR) diantaranya:

1. Menunjukkan apakah modal cukup untuk menutup risiko kerugian yang timbul akibat penanaman dana pada aset produktif. Rasio kecukupan modal mengukur kemampuan modal bank untuk memprediksi penurunan aset dan menutupi kemungkinan kerugian pinjaman. Rasio modal yang rendah menunjukkan bahwa suatu bank tidak memiliki permodalan yang baik karena bank tersebut memiliki kemampuan yang lebih kecil untuk menutupi kemungkinan gagal bayar keuangan.

2. Kemampuan untuk meningkatkan modal operasional dan membiayai seluruh aset tetap dan investasi bank. Rasio kecukupan modal yang tinggi berarti perusahaan mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya dan dapat lebih aman mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas. Rasio kecukupan modal yang tinggi menunjukkan bahwa bank mempunyai modal yang cukup untuk menambah cadangan kasnya yang dapat digunakan untuk membiayai ekspansi, sehingga meningkatkan peluang bank untuk meningkatkan profitabilitasnya.
4. Ketahanan dan Efisiensi Perbankan. Rasio modal yang rendah juga mengurangi kemampuan bank dalam menoleransi kerugian. Modal ekuitas yang dibutuhkan untuk menutup kerugian yang terjadi dengan cepat menjadi habis, sehingga pada akhirnya menyulitkan bank untuk terus beroperasi.

#### **2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Kecukupan Modal**

Menurut Rivai (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) adalah:

1. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya. Meliputi harta yang termasuk dalam neraca dan harta yang bersifat administratif (tidak termasuk dalam neraca). Setiap item dalam suatu aktiva diberi bobot risiko, yang besarnya didasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki aktiva tersebut.
2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya. Guna mempertimbangkan kualitas setiap aset untuk melihat seberapa besar kemungkinan mendapatkan kembali uang yang telah investasikan di dalamnya.

3. Total aktiva suatu bank. Semakin besar asetnya, semakin besar pula risikonya. Oleh karena itu, bank yang memiliki aset dalam jumlah besar tidak menjamin masa depannya, karena aset mempunyai bobot risiko tersendiri.

Adapun menurut (Riadi, 2020) hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki rasio kecukupan modal adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalkan komitmen kredit yang belum terpakai.
- b. Pinjaman yang diberikan lebih terbatas dan dipilih untuk mengurangi risiko.
- c. Fasilitas Bank Guarantee, yang menghasilkan keuntungan hanya pada posisi yang relatif kecil namun memiliki risiko yang sama dengan pinjaman ada baiknya harus dibatasi.
- d. Kewajiban *letter of credit* (L/C) kepada bank devisa yang tidak mempunyai jaminan, perlindungan, atau tidak dapat digunakan secara efektif juga harus dibatasi.
- e. Penyertaan yang mempunyai risiko 100% harus dipertimbangkan apakah akan menghasilkan keuntungan atau tidak.
- f. Kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa situasi aset dan inventaris tidak berlebihan dan tidak hanya sekedar memnuhi kelayakan.
- g. Menambah dan memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, *go public*, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham.

## **2.1.4 Inflasi**

### **2.1.4.1 Definisi Infasi**

Salah satu peristiwa terpenting di zaman modern yang terjadi di hampir setiap negara di dunia adalah inflasi. Definisi sederhana dari inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2006). Inflasi merupakan kenaikan harga suatu produk atau jasa secara terus-menerus, atau penurunan nilai uang secara keseluruhan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Antasari & Akbar, 2019). Hal ini tidak berarti bahwa harga berbagai barang akan naik pada tingkat yang sama. Peningkatan tersebut mungkin tidak terjadi secara bersamaan, yang penting adalah harga umum suatu komoditas meningkat secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, dimana suatu kondisi yang disebabkan oleh terlalu banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan keinginan masyarakat untuk memiliki atau menabung uang tersebut. Pendapat tersebut didasarkan bahwa kenaikan harga suatu barang di pasaran disebabkan oleh adanya kelebihan permintaan terhadap barang tersebut dibandingkan dengan penawarannya (*excess demand for the good*), dan hal ini menandakan terlalu banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan permintaan uang di masyarakat (*oversupply of money*). (Nur, 2012)

### **2.1.4.2 Jenis-Jenis Inflasi**

Menurut (Atmadja, 1999) dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dalam suatu kelompok tertentu, dan pengelompokkan yang digunakan bergantung pada tujuan yang ingin dicapai.

Jenis-Jenis inflasi:

1. Menurut Derajatnya

- Inflasi ringan                      di bawah 10% (*single digit*)
- Inflasi sedang                      10% - 30%
- Inflasi tinggi                      30% - 100%
- Hyperinflasion                      di atas 100%

Tingkat inflasi sebenarnya ditentukan oleh bagian dan kelompok masyarakat yang terkena dampak akibat inflasi yang terjadi saat ini, sehingga sulit untuk secara jelas menunjukkan tingkat keparahan dampak inflasi terhadap perekonomian suatu wilayah tertentu.

2. Menurut Penyebabnya

*Demand pull inflation* (inflasi tarikan permintaan), yaitu inflasi yang disebabkan oleh peningkatan yang signifikan dalam permintaan agregat masyarakat terhadap barang-barang yang diproduksi di pasar barang. Hal ini menarik kurva permintaan agregat ke kanan atas, sehingga terjadi *excess demand* (kelebihan jumlah permintaan). Dengan inflasi jenis ini, kenaikan harga barang biasanya selalu dibarengi dengan peningkatan output (GNP riil), dengan asumsi perekonomian belum mencapai kondisi *full employment*. Pentingnya peningkatan permintaan agregat sering ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli ekonomi. Kelompok monetaris berasumsi bahwa permintaan agregat meningkat karena adanya peningkatan jumlah uang beredar yang beredar di masyarakat. Sedangkan menurut kelompok Keynesian, dapat disebabkan oleh peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, walaupun tidak terjadi peningkatan jumlah uang beredar.

*Cost push inflation* (inflasi dorongan biaya), yaitu inflasi yang disebabkan oleh pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri atas. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurva penawaran agregat adalah kenaikan harga faktor-faktor produksi (dalam dan luar negeri) di pasar faktor, sehingga menyebabkan kenaikan harga bahan baku di pasar komoditi.

### 3. Menurut Asalnya

*Domestic inflation* (inflasi yang berasal dari dalam negeri), yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Inflasi ini sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian, baik di luar maupun di sektor dalam negeri oleh pelaku ekonomi dan masyarakat.

*Imported inflation* (inflasi yang berasal dari luar negeri), yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (negara asing yang mempunyai hubungan dagang dengan negara tersebut). Inflasi ini hanya terjadi di negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Dan inflasi ini bisa 'menular' baik melalui harga impor maupun harga ekspor.

Terlepas dari penggolongan tersebut, kenyataannya inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang yang disebabkan oleh satu jenis inflasi saja, namun seringkali disebabkan oleh beberapa jenis inflasi. Hal ini disebabkan karena tidak ada unsur atau pelaku ekonomi yang benar-benar mandiri dalam sistem perekonomian suatu negara. Contohnya, *imported inflation* sering kali diikuti oleh

*cost push inflation*, *domestic inflation* sering kali diikuti dengan *demand pull inflation*, dsb.

#### **2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, diantaranya:

##### **1. Jumlah Uang Beredar**

Dari sudut pandang moneteris, jumlah uang beredar dianggap sebagai penyebab utama inflasi di semua negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, jumlah uang beredar banyak diterjemahkan ke dalam konsep *narrow money* atau uang dalam arti sempit (M1). Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa kuasi mata uang hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan.

Sejak tahun 1976, presentase uang kartal yang beredar (48,7%) lebih kecil dibandingkan presentase jumlah uang giral (51,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sedang terjadi proses modernisasi di sektor keuangan Indonesia. Selain itu, semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia dan semakin meluasnya monetisasi kegiatan ekonomi subsisten menunjukkan bahwa tingkat inflasi cenderung meningkat. (Atmadja, 1999)

##### **2. Suku Bunga**

Berdasarkan keterangan Bank Indonesia (BI), suku bunga ditetapkan sebagai acuan untuk pengendalian nilai tukar, mempertahankan rata-rata bulanan SBI pada tingkat yang akan memberikan hasil dalam lelang pasar terbuka. Hal ini dimaksudkan agar bank mitra dapat saling mempengaruhi suku bunga satu sama lain dan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Sampai sekarang, bank sentral menggunakan suku bunga (BI rate) sebagai alat untuk mengendalikan tingkat inflasi. Ketika terjadi kasus kenaikan inflasi, Bank Indonesia mengambil langkah menaikkan suku bunga dengan harapan tingkat inflasi akan turun. Perubahan suku bunga mempengaruhi pasar modal dan pasar keuangan. Kenaikan suku bunga menyebabkan peningkatan pembayaran bunga. Hal ini akan berdampak sangat besar pada perusahaan yang mempunyai nilai rata-rata yang relatif tinggi. Selain itu, kenaikan ini dapat menurunkan profitabilitas perusahaan sehingga berdampak pada harga saham. (N. Y. Putra, 2022)

#### **2.1.4.4 Menentukan Tingkat Inflasi**

Ada empat indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi pada suatu periode tertentu (Rahardja dan Manurung (2008: 173)).

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)
3. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)
4. Alternatif Indeks Harga Implisit

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang menunjukkan tingkat harga suatu barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam jangka waktu tertentu. Nilai IHK ditentukan dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi penduduk selama periode waktu tertentu. Setiap harga barang dan jasa diberi bobot sesuai dengan tingkat prioritasnya. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK didasarkan pada Survei

Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS). IHK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Inflasi = \frac{IHK_2 - IHK_1}{IHK_1} \times 100\%$$

Keterangan:

- IHK 1 = indeks harga konsumen pada periode t (setelahnya)
- IHK 2 = indeks harga konsumen pada periode t-1 (sebelumnya).

## 2.1.5 Kredit Usaha Rakyat

### 2.1.5.1 Sejarah kredit

Menurut Wikipedia, istilah "kredit" pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1520-an. Istilah ini berasal "dari *crédit* Prancis Tengah yaitu "kepercayaan," dari *credito* Italia, dari *creditum* Latin yaitu "pinjaman, hal yang dipercayakan kepada yang lain". Arti komersial dari "kredit" "adalah yang asli dalam bahasa Inggris (kreditor). Ungkapan turunan "*credit union*" pertama kali digunakan pada tahun 1881 dalam bahasa Inggris Amerika. Ungkapan "peringkat kredit" pertama kali digunakan pada tahun 1958.

Kredit adalah kepercayaan yang memungkinkan satu pihak untuk memberikan uang atau sumber daya kepada pihak lain, tetapi pihak kedua tidak segera membayar kembali ke pihak pertama (akibatnya menimbulkan utang), namun menjanjikan untuk membayar kembali atau mengembalikan sumber daya ini di kemudian hari. Sumber daya yang diberikan oleh pihak pertama dapat berupa barang, pemenuhan janji, atau hasil kinerja. Dengan kata lain, kredit adalah sebuah metode untuk membuat timbal balik menjadi formal, mengikat secara hukum, dan

dapat diperluas ke sekelompok besar orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sumber daya yang disediakan bisa berupa finansial, barang atau jasa. Kredit mencakup segala bentuk pembayaran yang ditangguhkan. Kredit diberikan oleh kreditor yang disebut juga pemberi pinjaman kepada debitur yang disebut peminjam.

Pembayaran angsuran sudah ada sejak zaman Neolitikum. Namun, sistem kredit "modern" baru diterapkan di Prancis pada abad ke-19. Ini muncul dengan berkembangnya *department store* dan mengkhususkan diri dalam pembelian dan penjualan barang-barang tahan lama konsumen. Pada tahun 1865, pengecer furnitur, meningkatkan penjualan di tokonya dengan berlangganan dan membujuk pengecer lain untuk mengadopsi sistemnya. Mantan rekan Crespin, Georges Dufayel, mengembangkan sistem tersebut. Seperti yang dijelaskan Sean O'Connell, "ini melibatkan pembelian voucher, berkat pembayaran yang dikumpulkan oleh wisatawan Dufayel. Voucher dibelanjakan di banyak toko yang menerimanya". Pada tahun 1913, beberapa mantan karyawan Dufayel mendirikan La Semeuse, sebuah perusahaan pembiayaan penjualan berdasarkan sistem kredit ini, serta apa yang disebut serikat ekonomi. Model kredit ini ditandai dengan pembayaran bulanan, penjualan *door to door*, dan kredit konsumen khusus untuk peralatan rumah tangga. Selama periode antar perang, kredit angsuran semakin dikaitkan dengan pembelian barang tahan lama baru seperti mobil, peralatan, dan radio, dan anak perusahaan pinjaman angsuran dari produsen yang berpartisipasi lebih banyak terlibat dalam aktivitas ini dibandingkan pengecer. (Gaillard, 2012)

Seperti banyak hal lainnya, kredit konsumen harus dibangun kembali setelah Perang Dunia II. Dari tahun 1949-1950, Philips, melalui anak perusahaan pinjaman angsurannya, *Radiofiduciaire*, mempromosikan kredit konsumen ketika memasarkan televisi. Namun, baru pada tahun 1954 kredit konsumen terhadap televisi benar-benar meningkat pesat di Prancis. Modernisasi teknik perbankan dan pengembangan simpanan gaji bulanan telah berkontribusi dalam mempertahankan struktur kelembagaan modern untuk kredit konsumen. Metode-metode baru telah menyederhanakan prosesnya, dan *Celem* telah membantu memperkenalkannya. Metode ini terutama terinspirasi dari Amerika Serikat. Dari tahun 1950 hingga pendirian perusahaan pada tahun 1953, Boris Mera, kolaborator dekat Jacques de Fouchier (ketua dan *Chief Executive Officer Celem*), tinggal di Amerika Serikat, tempat ia memperkenalkan teknik kredit baru ke dalam *Consumed* sebagai buku catatan dengan wesel. Sementara sistem *draft* lama memberikan inisiatif pembayaran utang kepada pemberi pinjaman, metode baru mengalihkannya ke peminjam. Peminjam sekarang dapat dengan mudah membayar setiap angsuran bulanan dengan cek atau wesel. Dengan mengalihkan biaya pengiriman surat yang signifikan kepada pelanggan, metode ini mengurangi biaya pengumpulan pembayaran bagi bisnis. Pada tahun 1965, *Cetelem* memutuskan untuk menciptakan apa yang disebut “kredit saku”. Itu juga terinspirasi oleh pengalaman Amerika dengan kredit akhir. Kredit saku pada dasarnya adalah kartu kredit yang memungkinkan pelanggan memiliki sejumlah uang yang tersedia untuk pembelian. Biaya kredit kemudian akan ditambahkan ke sisa saldo bulanan. Namun, kredit bergulir ini hanya merupakan sebagian kecil dari total pinjaman yang diberikan

*Cetelem* kepada individu, bahkan hingga tahun 1981. Kredit konsumen di Perancis sebagian besar masih berupa kredit angsuran. Namun, metode-metode baru di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut selama masa *booming* paska perang berkontribusi terhadap pertumbuhan penjualan kredit dengan memfasilitasi prosedur dan mengurangi biaya. (Gaillard, 2012)

#### **2.1.5.2 Definisi Kredit Usaha Rakyat**

Semakin berkembangnya zaman, pada tahun 1970-1980an, sejumlah negara terutama negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin mulai meluncurkan program kredit mikro sebagian dari upaya mengentas kemiskinan. Program-program ini bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh lembaga keuangan formal. Hingga pada tahun 1990an, beberapa negara memperluas cakupan program kredit mikro menjadi lebih luas, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Di Negara Indonesia sendiri mengeluarkan sistem kredit bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit tersebut berupa Kredit Usaha Rakyat atau kerap disingkat KUR. KUR dibentuk agar memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan modal demi kelancaran usahanya.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga pembiayaan dengan "model penjaminan". Program KUR bertujuan untuk memperkuat kapasitas permodalan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang bertujuan mendorong pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Untuk mencapai hal tersebut,

pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan untuk mendorong pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Program KUR resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pendanaan yang disalurkan KUR berasal dari dana lembaga keuangan yang menyalurkan KUR. Dana yang diberikan dalam bentuk dana modal kerja dan dana investasi dialokasikan kepada UMKM perseorangan, unit usaha, dan kelompok usaha yang mempunyai kegiatan usaha yang efektif serta layak namun belum mampu membayar.

Pada perkembangannya, program KUR mengalami perubahan skema pemberian subsidi. Pada periode penyaluran KUR yang pertama yaitu tahun 2007 hingga tahun 2014, subsidi KUR diberikan melalui mekanisme Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Imbal jasa penjaminan adalah imbalan jasa yang merupakan hak perusahaan penjaminan yang bertindak selaku peminjam atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan bank pelaksana dalam rangka KUR. Kemudian, pada tahun 2015, Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR dengan model penjaminan dan memutuskan bahwa skema tersebut tidak sesuai dengan sarannya. (KUR, 2018)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UKMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang layak namun belum *bankable*. Artinya, perusahaan tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. KUR merupakan program yang dirancang pemerintah namun modal seluruhnya berasal dari dana perbankan. Pemerintah memberikan pinjaman dengan risiko KUR 70% sedangkan sisanya

30% ditanggung oleh bank pelaksana penjaminan KUR diberikan dalam rangka peningkatan akses UMKM terhadap sumber daya keuangan.

UMKM diharapkan dapat mengakses KUR yang bergerak pada sektor-sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan kelautan, industri pengolahan, kehutanan, serta jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, artinya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau cabang pembantu bank pelaksana. Untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha mikro, penyaluran KUR juga dapat dilakukan secara tidak langsung, artinya pelaku usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan link page program layanan yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. (Satria, 2019)

### **2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kemudian diputuskan untuk pelaksanaan program KUR sejak Agustus 2015 dengan sistem subsidi bunga/margin. Subsidi bunga adalah sebagian bunga yang ditanggung pemerintah berdasarkan selisih antara tingkat bunga yang diterima penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Sedangkan subsidi margin merupakan bagian keuntungan yang ditanggung pemerintah berdasarkan selisih antara margin yang diterima penyalur kredit/keuangan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dengan skema *sponsorship* syariah. Pemberian subsidi bunga/simpanan menyebabkan tingkat bunga kredit/pembiayaan KUR sangat rendah dibandingkan dengan kredit bank umum. Tingkat suku bunga terus mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 24%, kemudian terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 6%.(KUR, 2018)

KUR dapat meningkatkan akses modal, karena hambatan terbesar bagi pelaku usaha kecil adalah kurangnya modal. Dengan KUR, usaha kecil dapat mengakses modal yang diperlukan, sehingga para pelaku usaha dapat memperluas operasi pasar mereka, juga dapat meningkatkan produksi, atau bahkan menciptakan produk dan layanan baru. Dengan meningkatnya akses modal, usaha kecil memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya usaha kecil yang berkembang, akan meningkatkan aktifitas ekonomi di suatu wilayah. Hal ini berarti meningkatnya harga akan barang dan jasa yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan pertumbuhan usaha kecil yang didukung oleh KUR, otomatis akan menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dengan beragamnya usaha kecil yang dibiayai oleh KUR, ekonomi daerah menjadi tangguh terhadap perubahan eksternal. Kekuatan ekonomi yang berasal dari usaha kecil dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal, sehingga mengurangi risiko terhadap fluktuasi yang tidak terduga. Secara keseluruhan, KUR memiliki peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan.

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu juga merupakan referensi bagi penulis untuk mengetahui variabel bebas penelitian apakah memiliki pengaruh terhadap variabel berikutnya. Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis, Tahun, Judul, Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dwitya Yulia Ramandhana, A.A. Ketut Jayawarsa dan Ita Silvia Azita Aziz/2018  Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, NPL, dan CAR terhadap Penyaluran Kredit Rakyat pada Umum di Indonesia 2013-2017	-Variabel Dependen: KUR  -Variabel Independen: 1. NPL 2. CAR 3. Inflasi  -Teknik analisis regresi linear berganda	Menggunakan variabel independen pertumbuhan ekonomi	Pengaruh positif yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa semakin rendah Suku Bunga BI Rate, NPL, dan CAR maka akan menaikkan penyaluran KUR, sedangkan pengaruh negatif yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa semakin tinggi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi maka akan menurunkan penyaluran KUR. Secara simultan Inflasi, Suku Bunga BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, NPL dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Umum di Indonesia.	Warmadewa <i>Economic Development Journal</i> , Universitas Warmadewa, Denpasar, 1 (1) 2018 30-40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Eling Ri Kurniati, Febriana Eriska Putri/2020  Pengaruh NPL, CAR, ROA, dan BI Rate terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016	-Variabel Independen: 1. NPL 2. CAR  -Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda	Variabel Independen - ROA - BI Rate  Variabel Dependen: Kredit umum	1. NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. 2. CAR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. 3. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 4. BI Rate berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. 5. NPL, CAR, ROA dan BI Rate secara bersama-sama mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan.	Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis, STIE Tamansiswa Banjarnegara (2020), 71-84, 11
3.	Thomas Firdaus Hutahaean, Carissa Komalasari, Inka Amelia Br Ambarita, Cynthia Tanika/2022  <i>Analysis Of Factors Affecting The Distribution Of People's Business Loans 2012-2020</i>	-Variabel Dependen: KUR  -Variabel Independen: 1. NPL 2. CAR 3. Inflasi  -Teknik analisis regresi linear berganda	-Periode penelitian -PDRB	Penyaluran KUR tahun 2012-2020 tidak terpengaruh oleh inflasi, tidak terpengaruh oleh suku bunga pinjaman, dipengaruhi oleh PDRB, tidak terpengaruh oleh kredit bermasalah, dan dipengaruhi oleh rasio kecukupan modal.	Jurnal Mantik, Universitas Prima Indonesia, 6 (3) (2022),
4.	Shella Yoseva Simangunsong, Nurhadi/2023  Pengaruh NPL, CAR dan Inflasi terhadap Penyaluran KUR	-Variabel Dependen: KUR  -Variabel Independen: 1. NPL 2. CAR 3, Inflasi	-Menggunakan teknik seleksi purposive	Penyaluran KUR pada bank penyalur KUR periode 2018-2021 tidak dipengaruhi secara signifikan oleh NPL, dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh CAR, dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh inflasi.	Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, UPN "Veteran", Surabaya Vol. 4, No. 1, 37-48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Suci Prihartini, I Made Dana/ 2018  Pengaruh CAR, NPL, dan ROA terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk)	-Variabel Dependen: KUR  -Variabel Indeoden: 1. NPL 2. CAR	-ROA -Studi kasus di salah satu bank	-Pengaruh langsung NPL terhadap penyaluran KUR yaitu berpengaruh negatif dan signifikan. Ini berarti tingginya kredit bermasalah akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan. -Pengaruh langsung ROA terhadap penyaluran KUR yaitu negatif dan signifikan. Ini berarti kemampuan menyalurkan kredit perbankan berkurang karena bank memiliki laba yang tinggi tetapi risiko kreditnya juga tinggi. -ROA mampu memediasi pengaruh CAR terhadap penyaluran KUR. Ini berarti kecukupan modal BRI yang tinggi mampu melindungi bank dari risiko yang terjadi.	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1168-1194. Universitas Udayana, Bali
6.	Diny Niken Citra Pangalih/2016  Analisis Pengaruh DPK, NPL, Sertifikat BI, dan Suku bunga KUR terhadap Penyakuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi pada PT. BRI (Persero) Tbk. Periode Januari 2012 – Agustus 2014	-Variabel Dependen: KUR  -Variabel Independen: 1. NPL 2. Suku Bunga Pinjaman	-DPK -SBI -Studi kasus di salah satu bank	1. DPK, NPL, dan suku bunga KUR secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran KUR. 2. Semakin besar DPK yang dihimpun menyebabkan kenaikan jumlah kredit oleh bank. 3. Walaupun penyaluran kredit macet mengganggu Kesehatan bank, BRI tetap menyalurkan KUR. 4. Sertifikat BI merupakan alternatif sumber dana bank. 5. Nasabah tidak terlalu mempertimbangkan suku bunga yang ditawarkan.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Maria Nona dince, Petrus Da Silva/2019  Pengaruh Suku Bunga terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRI (Persero) TBK. Unit Nita	Variabel Dependen: KUR	-Suku Bunga -Studi kasus di salah satu bank	1. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari <i>level of significant</i> ( $0,001 < 0,05$ ) keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dan menolak hipotesis nol ( $H_o$ ), dengan demikian variabel Suku Bunga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Jumlah KUR. 2. Variabel suku bunga kredit/pinjaman terhadap permintaan kredit menunjukan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan	Universitas Nusa Nipa (2019)
8.	Isnain Effendi/2016  Analisis Pengaruh Suku Bunga terhadap Kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Provinsi Jambi	-Kredit UMKM atau KUR	-NPL -CAR	Kredit UMKM yang diberikan BPD terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan, dengan nilai probabilitas sebesar 0.0024 di bawah ( $\alpha=10\%$ ) menunjukan bahwa perubahan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% terhadap perubahan kredit UMKM. Tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap kredit UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi tingkat suku bunga kredit, yaitu sebesar -3.536099.	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Dessy Handa Sari, Rabiatul Annisa, Totok Ismawanto/ 2021  Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , BI7DRR, Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit UMKM	-Variabel dependen: KUR  -Variabel independen: 1. CAR 2. Inflasi  -Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda	Variabel independen pdb: BI7DRR	Simpulan: 1. CAR, BI7DRR, dan Inflasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. 2. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. 3. BI7DRR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. 4. CAR tidak memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM.	Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, Politeknik Negeri Balikpapan, Vol. 8 (1) 2021 (50-55)
10.	Vania Elvaretta/2022  Pengaruh DPK, NPL, Inflasi, dan PDRB terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada bank di Pulau Jawa Tahun 2015-2021	Variabel independen: 1. NPL 2. Inflasi	-Regresi data panel -Variabel independen DPK dan PDRB	Simpulan: 1. DPK berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM 2. NPL berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM 3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM 4. PDRB berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM	Universitas Islam Indonesia (2022)
11.	Nur Kumala Sari, Niniek Imaningsih/2022  Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Penyaluran KUR bagi UMKM	-Variabel dependen: KUR  -Variabel Independen yaitu suku bunga pinjaman, car, inflasi	Tidak terdapat variabel independen npl atau kredit bermasalah	Simpulan: 1. Tingkat suku bunga KUR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran KUR 2. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran KUR	Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, UPN "Veteran" Jawa Timur (121-132), 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020)	Kasus -Teknik analisis regresi linier berganda			3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran KUR Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020 4. Tingkat suku bunga KUR, CAR dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2011-2020.	
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis					
12.	Farida Qusnul Khotimah, Suci Atiningsih/2018  Pengaruh DPK, NPL, LDR dan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi pada BPR di Kota Semarang Tahun 2013-2016)	Menggunakan variabel independen NPL, suku bunga kredit/pinjaman	Menggunakan variabel independen DPK, LDR  Menggunakan metode <i>purposive sampling</i>	DPK berpengaruh positif dan signifikan, NPL berpengaruh negatif dan signifikan, LDR berpengaruh positif dan signifikan, Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM Bank Perkreditan Rakyat.	Jurnal STIE Semarang, Vol 10 (2), 2018
13.	Nensy Ratnasari, Yoyok Soesatyo/ 2016  Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit kepada UMKM oleh Perbankan di Indonesia Tahun 2011-2015	Variabel independen: inflasi, NPL, CAR	Menggunakan variabel independen DPK, BI Rate  Pengolahan data dengan metode regresi data panel	Inflasi, BI Rate, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan. NPL, CAR, dan DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Secara bersama-sama Inflasi, BI Rate, Pertumbuhan Ekonomi, NPL, CAR, dan DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.	Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Vol 4 (3), 2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Ade Efriany, Dewi Rahmayanti, SE., M.SM/2016  Analisis Pengaruh CAR, LDR, NPL, dan ROA terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Menggunakan variabel independen CAR, NPL  Teknik analisis data adalah analisis regresi berganda	Menggunakan variabel independen LDR, ROA	CAR, NPL, dan ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, maka sebaiknya bank umum yang ingin menyalurkan kreditnya memperhatikan rasio ini. Dengan dipenuhinya rasio ini, maka bank lebih aman dalam menyalurkan kredit	Universitas Bengkulu (2016)
15.	Nani Pratiwi/2022  Analisis Determinan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Variabel independen: CAR, suku bunga kredit/pinjaman	Menggunakan variabel independen LDR, DPK, PDB	<i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif, Suku Bunga Kredit/Pinjaman berpengaruh negatif, Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh, dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penyaluran KUR.	Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022)

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono 2019)

Ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun suatu penelitian, munculnya kerangka pikir juga untuk menjelaskan tingkat suku bunga pinjaman, kredit bermasalah, rasio kecukupan modal, dan inflasi terhadap penyaluran kredit usaha rakyat.

### **2.2.1 Hubungan antara Suku Bunga Pinjaman dengan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. (Suhedi, 2000)

Bagi peminta kredit maka bunga yang rendah akan sangat diminati dan sebaliknya jika bunga tinggi maka mereka akan berfikir dan tidak berminat untuk mengambil kredit tersebut. Menurut (Kumala Sari & Imaningsih, 2022) suku bunga pinjaman/kredit terhadap permintaan penyaluran KUR berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel suku bunga pinjaman, maka akan mengakibatkan terjadi penurunan pada penyaluran KUR.

### **2.2.2 Hubungan antara Kredit Bermasalah dengan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

*Non Performing Loan* (NPL) digunakan untuk mengukur jumlah kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang tinggi akan berpengaruh terhadap kesehatan bank dan akan menurunkan pendapatan pada bank, baik yang bersumber dari penerimaan bunga maupun penerimaan pengembalian pinjaman. Meningkatnya risiko bagi perbankan atas meningkatnya kredit bermasalah membuat peputaran uang pada perbankan akan terhambat, sehingga akan menyulitkan bank dalam menyalurkan kembali dananya. Semakin tinggi NPL maka risiko yang akan ditanggung perbankan dalam menyalurkan kredit juga akan semakin tinggi, sehingga mempengaruhi kesehatan bank (Andreani & Marya, 2013).

Menurut (Prihartini & Dana, 2018), pengaruh kredit bermasalah terhadap penyaluran KUR yaitu negatif dan signifikan. Ini berarti tingginya kredit bermasalah akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan.

### **2.2.3 Hubungan antara Rasio Kecukupan Modal dengan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

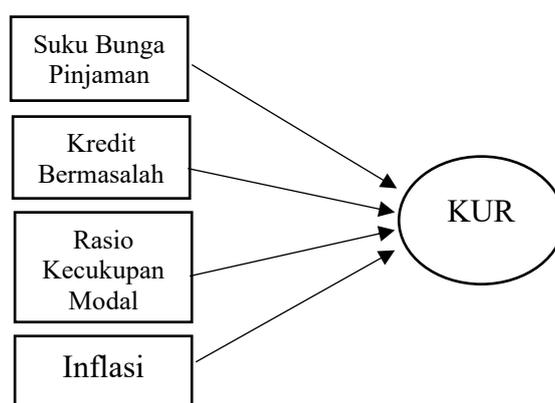
Rasio kecukupan modal adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk kebutuhan pengembangan usaha dan menutup risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi rasio kecukupan modal, maka semakin efisien operasional kinerja bank tersebut (Yuda, 2014). Tingginya rasio kecukupan modal suatu bank menunjukkan bahwa modal yang dimiliki bank tersebut juga tinggi, sehingga mempengaruhi salah satu kegiatan operasional bank yaitu penyaluran kredit kepada UMKM (Mahendra, 2011).

Menurut (Simangunsong & Nurhadi, 2023) rasio kecukupan modal berpengaruh positif terhadap penyaluran Kredit UMKM pada bank umum yang artinya semakin tinggi rasio tingkat kecukupan modal maka akan semakin besar tingkat penyaluran KUR oleh bank.

#### 2.2.4 Hubungan antara Inflasi dengan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga secara terus menerus. Semakin naik harga, semakin banyak pula masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka ketika terjadi inflasi, pemenuhan kebutuhan hidup biasanya masyarakat mengajukan pinjaman ke bank. Oleh karena itu, menurut (A. M. Putra, 2018) ketika inflasi terjadi maka penyaluran kredit perbankan meningkat.

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut bahwa Tingkat suku bunga pinjaman, kredit bermasalah, rasio kecukupan modal, dan inflasi mempengaruhi penyaluran kredit usaha rakyat. Untuk lebih jelas mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis ini berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berarti kebenaran) (Hasan, 2004).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial tingkat suku bunga pinjaman dan kredit bermasalah berpengaruh negatif, sedangkan rasio kecukupan modal, dan inflasi berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit usaha rakyat pada bank umum di Indonesia tahun 2007-2022.
2. Diduga secara bersama-sama tingkat suku bunga pinjaman, kredit bermasalah, rasio kecukupan modal, dan inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit usaha rakyat pada bank umum di Indonesia tahun 2007-2022.